

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2. 1 Konsep yang Mendasari Penelitian

Konsep yang mendasari penelitian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung di adalah sebagai berikut.

2. 1. 1 Tinjauan tentang Kesiapsiagaan

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan masyarakat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian sumber daya dan langkah-langkah efektif yang bertujuan mengurangi dampak bencana. Kesiapsiagaan ini mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Sebagaimana dikemukakan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2007) sebagai berikut “Kesiapsiagaan dikelompokkan kedalam empat parameter yaitu pengetahuan dan sikap, perencanaan kedaruratan, sistem peringatan, dan mobilisasi sumber daya” (Nugroho,2007,Hal.22).

Dalam konteks ini, kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi bencana, dan hal ini dapat dikelompokkan ke dalam empat parameter penting. Pertama, pengetahuan dan sikap, yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami risiko bencana dan memiliki kesadaran untuk bertindak. Kedua, perencanaan kedaruratan, yang mencakup langkah-langkah terstruktur untuk

menghadapi situasi darurat. Ketiga, sistem peringatan, yang berfungsi sebagai alat pemberi informasi cepat dan akurat agar masyarakat dapat merespons dengan tepat. Terakhir, mobilisasi sumber daya, yang memastikan bahwa segala kebutuhan, baik logistik maupun tenaga, dapat dikelola secara efektif saat bencana terjadi. Keempat parameter ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006), ada lima aspek kesiapsiagaan bencana yaitu sebagai berikut.

1. Pengetahuan terhadap risiko bencana. Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana alam banjir.
2. Kebijakan dan panduan. Faktor ini berkaitan dengan kebijakan dan panduan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkret dalam peraturan – peraturan.
3. Rencana untuk keadaan darurat bencana. Rencana merupakan bagian penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan, dan penyelamatan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari-hari pertama setelah bencana sebelum bantuan dari pihak luar datang.

4. Sistem peringatan bencana. Sistem meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Dengan peringatan ini, masyarakat dapat melakukan tindakan evakuasi dan langkah awal yang tepat untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian materiil lainnya.
5. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya yang tepat, baik sumber daya manusia, maupun pendanaan dan sarana prasarana penting untuk keadaan darurat, merupakan potensi yang dapat mendukung dalam kesiapsiagaan bencana alam.

Menurut Nugroho (2007), ada empat aspek kesiapsiagaan bencana yaitu sebagai berikut.

1. Pengetahuan dan sikap. Pengetahuan selalu menjadi pondasi awal bagi setiap tindakan dan kesadaran seseorang. Dengan memiliki pemahaman yang cukup, diharapkan seseorang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan bermakna. Kapasitas pengetahuan inilah yang nantinya dijadikan sebagai dasar untuk bertindak, baik dalam menghadapi situasi sehari-hari maupun dalam merespons hal-hal yang bersifat mendesak, seperti kesiapsiagaan bencana.
2. Rencana untuk keadaan darurat bencana. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam kajian ini memang perlu dibuktikan melalui tindakan nyata. Namun, setidaknya aspek ini dapat melihat gambaran awal dari rencana-rencana yang masyarakat susun terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Parameter inilah yang akan membantu mengukur sejauh mana keseriusan dan kesiapan masyarakat dalam merespons potensi bencana.

3. Sistem peringatan. Salah satu komponen penting dalam kesiapsiagaan adalah adanya sistem peringatan dini bencana. Sistem ini memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi. Dengan adanya sistem peringatan dini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman bencana, karena mereka memiliki waktu untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, seperti mengungsi, menyiapkan perlengkapan darurat, atau mengamankan barang-barang berharga.
4. Mobilisasi sumberdaya. Aspek mobilisasi sumber daya juga memegang peranan penting dalam kesiapsiagaan bencana. Kemampuan untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya yang ada, seperti logistik, alat-alat darurat, atau tenaga relawan, dapat menentukan seberapa efektif respons terhadap bencana.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bencana banjir, merupakan upaya penting yang melibatkan lima parameter utama: pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, perencanaan kedaruratan, sistem peringatan, dan mobilisasi sumber daya. Pengetahuan tentang risiko bencana, sebagaimana ditekankan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006), menjadi dasar untuk membentuk sikap dan kesadaran masyarakat, sementara perencanaan kedaruratan memastikan langkah-langkah terstruktur dalam menghadapi situasi darurat. Sistem peringatan dini, yang juga dijelaskan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006), berperan memberikan informasi cepat dan akurat, memungkinkan masyarakat mengambil tindakan antisipatif. Terakhir, mobilisasi sumber daya, baik manusia, logistik, maupun sarana prasarana, menjadi kunci dalam menunjang respons efektif saat bencana terjadi, sebagaimana diuraikan

oleh Nugroho (2007). Keempat aspek ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga masyarakat dapat lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana banjir, sesuai dengan pandangan kedua penelitian tersebut.

2. 1. 2 Tinjauan tentang Masyarakat

Koentjaraningrat (1984) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kebudayaan yang sama. Menurutnya, masyarakat tidak hanya sekumpulan individu, tetapi juga memiliki sistem sosial dan budaya yang mengatur hubungan antaranggota.

Struktur masyarakat menurut Koentjaraningrat (1984) terdiri dari empat komponen utama yang saling terkait yaitu, 1) struktur sosial, yang merujuk pada pola hubungan antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat, seperti stratifikasi sosial (pengelompokan berdasarkan status ekonomi, pendidikan, atau kekuasaan) serta peran dan status sosial yang dimiliki oleh setiap anggota. 2) sistem nilai dan norma, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku dan interaksi sosial, seperti adat istiadat, hukum, dan moral yang menjadi pedoman hidup bersama. 3) institusi sosial, yang merupakan lembaga-lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti keluarga (sebagai unit terkecil), pendidikan (sebagai sarana pengembangan pengetahuan), agama (sebagai pengatur kehidupan spiritual), dan ekonomi (sebagai pengatur distribusi sumber daya). 4) kebudayaan, yang mencakup seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, seperti bahasa, seni, teknologi, dan kepercayaan, yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas bersama. Struktur-struktur ini

bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan berkelanjutan.

Masyarakat memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sekumpulan individu biasa yaitu 1) adanya interaksi sosial yang teratur, di mana anggota masyarakat saling berkomunikasi dan berinteraksi secara konsisten, baik dalam bentuk kerja sama, kompetisi, maupun konflik. 2) kesamaan kebudayaan, yang berarti masyarakat memiliki sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menciptakan identitas bersama. 3) kesadaran sebagai bagian dari kelompok, di mana setiap anggota merasa terikat dan memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya. 4) adanya sistem sosial yang teratur, yang mencakup aturan dan mekanisme untuk mengatur hubungan antaranggota, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan. 5) keterikatan pada wilayah tertentu, di mana masyarakat biasanya tinggal dalam suatu daerah geografis yang sama dan memiliki ikatan emosional maupun fungsional dengan lingkungan tersebut. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan masyarakat sebagai suatu entitas yang dinamis, terorganisir, dan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman.

2. 1. 3 Tinjauan tentang Bencana Banjir

Menurut Khotimah, dkk (2013), mendefinisikan banjir sebagai fenomena hidrologis yang memiliki dua dimensi utama. Secara sosial-ekonomi, banjir diartikan sebagai aliran atau genangan air yang mengakibatkan kerusakan material hingga korban jiwa. Sementara dari perspektif teknis, banjir merupakan kondisi ketika debit aliran sungai melebihi kapasitas tampung salurannya, menyebabkan luapan air ke

daerah sekitarnya. Rahayu (2009) menjelaskan banjir sebagai kondisi tergenangnya suatu wilayah akibat melampauinya kapasitas sistem drainase oleh air, yang kemudian menimbulkan berbagai kerusakan mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Definisi ini diperkuat oleh Ligal (2008) yang menekankan karakteristik banjir sebagai peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering (non-rawa) akibat faktor meteorologis seperti intensitas hujan tinggi maupun kondisi topografis wilayah berupa bentuk lahan rendah atau cekung.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa banjir merupakan fenomena alam yang terjadi ketika volume air melampaui kemampuan saluran drainase suatu wilayah, sehingga menyebabkan genangan di area tertentu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu tatanan sosial masyarakat serta menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Rahayu menekankan bahwa dampak banjir tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Banjir juga dapat diartikan sebagai peristiwa ketika daratan yang biasanya kering, seperti wilayah non-rawa, tergenang oleh air.

Menurut Ristya (2012), berdasarkan sumber asal limbah air yang menyebabkan banjir, terdapat dua jenis banjir, adalah sebagai berikut.

1. Banjir Lokal. Banjir lokal disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan belum tersedianya sarana drainase memadai. Banjir lokal ini lebih bersifat setempat, sesuai dengan luas sebaran hujan lokal. Banjir ini semakin parah apabila saluran

drainase tidak berfungsi secara optimal, dimana saluran tersebut tersumbat sampah, sehingga mengurangi kapasitas penyalurannya.

2. Banjir Kiriman. Banjir kiriman ini disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang mengalir. Banjir ini diperparah oleh kiriman dari daerah atas. Sebagian besar sebagai akibat bertambah luasnya daerah terbangun dan mengubah koefisien aliran di daerah tangkapan, sehingga semakin banyak air yang menjadi aliran permukaan, sebaliknya semakin sedikit air meresap menjadi air tanah.

Menurut Ristya (2012), banjir dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber asal limbah air yang menyebabkannya, yaitu banjir lokal dan banjir kiriman. Banjir lokal terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan kurang memadainya sarana drainase, yang sering diperparah oleh penyumbatan saluran akibat sampah. Sementara itu, banjir kiriman disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang dipengaruhi oleh aliran dari daerah hulu, diperburuk oleh perubahan tata guna lahan yang meningkatkan aliran permukaan dan mengurangi resapan air tanah. Kedua jenis banjir ini menekankan pentingnya pengelolaan drainase yang efektif dan pengendalian tata guna lahan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.

2. 1. 4 Praktik Pekerjaan Sosial dengan Bencana

Menurut Tukino (2013), profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana yaitu sebagai berikut.

1. Praktik Pekerjaan Sosial pada Tahap Prabencana

Peranan Pekerja Sosial sangat penting dalam pengurangan risiko bencana, terutama dalam hal:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi mengenai kerawanan, bahaya dan risiko bencana. Pada situasi tidak terdapat bencana, kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai risiko bencana pada tataran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengatasi risiko bencana yang mungkin terjadi.
- b. Pemetaan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana. Kegiatan pemetaan memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi pola risiko bencana yang dihadapi masyarakat sekaligus menilai kemampuan lokal dalam menghadapi ancaman tersebut. Lebih dari itu, proses pemetaan ini berfungsi untuk memvisualisasikan berbagai potensi lokal yang dapat dimobilisasi, meliputi aspek: (1) kompetensi dan keterampilan warga, (2) ketersediaan logistik pangan, (3) alternatif lokasi pengungsian darurat, (4) jejaring kelembagaan sosial, (5) kepemimpinan komunitas, (6) nilai-nilai kearifan lokal, serta (7) sumber daya pendukung lainnya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- c. Bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada tingkat lokal. Penyusunan struktur kelembagaan kebencanaan yang memiliki kapasitas operasional dalam mengimplementasikan mekanisme pra-bencana (pencegahan dan mitigasi), tanggap darurat, serta fase rehabilitasi pasca-bencana.

- d. Pekerja sosial juga dapat melakukan advokasi kepada parapihak, yang bertujuan agar terjadi perubahan pada tataran kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana.

2. Praktik Pekerjaan Sosial pada Saat Terjadi Bencana

Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana dan pengungsi, terutama dalam hal:

- a. Penanganan terhadap korban bencana yang mengalami trauma, dapat ditempuh dengan mendirikan pusat-pusat pelayanan berupa “*Resilience Development Projects*” yang lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial.
- b. Penanganan terhadap kelompok rentan; dengan memberikan perlindungan khusus, agar mereka tidak semakin parah dalam situasi pengungsian.
- c. Upaya penyediaan sarana pendidikan alternatif sebagai solusi sementara selama proses rehabilitasi infrastruktur sekolah yang rusak, guna menjamin keberlangsungan pembelajaran anak-anak terdampak.
- d. Upaya pemulihan pasca bencana harus mencakup intervensi terhadap disfungsi struktur keluarga dengan pendekatan komprehensif yang meliputi: (1) rehabilitasi sistem dukungan sosial, (2) revitalisasi peran sosial, (3) penguatan kembali ikatan komunitas, serta (4) penanganan kondisi ketidakpastian. Strategi implementasinya dapat diwujudkan melalui mekanisme fasilitasi dialog partisipatif antara penyintas dengan para pemangku kepentingan, dimana proses deliberatif ini berfungsi untuk

mengkristalisasi berbagai aspirasi menjadi kerangka kerja kolektif yang mengarah pada rekonstruksi kehidupan sosial yang lebih berkelanjutan.

3. Praktik Pekerjaan Sosial pada Pascabencana

Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana dan pengungsi, terutama dalam hal:

- a. Pembentukan atau pengembangan forum warga/keluarga pengungsi korban bencana alam. Forum ini dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi, solidaritas, dan toleransi sosial antar korban bencana maupun masyarakat lokal.
- b. Pelatihan-pelatihan penanganan masalah. Merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para korban bencana di daerah pasca bencana dalam mengatasi masalah atau dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
- c. Pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha.

Menurut Tukino (2013), pekerjaan sosial memegang peran krusial dalam penanggulangan bencana, meliputi tiga tahap utama: pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, pekerja sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memetakan kapasitas lokal, membangun sistem penanggulangan bencana, serta melakukan advokasi kebijakan. Saat terjadi bencana, pekerja sosial fokus pada penanganan trauma, perlindungan kelompok rentan, penyediaan fasilitas pendidikan, dan restorasi fungsi sosial keluarga yang terganggu. Pada tahap pasca bencana, pekerja sosial membantu membentuk forum warga,

memberikan pelatihan penanganan masalah, serta mendukung pemulihan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Dengan demikian, pekerja sosial tidak hanya membantu pemulihan fisik dan psikologis korban, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan.

2. 2 Kerangka Pikir Penelitian

Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa kerangka pikir dalam penelitian adalah proses logis dan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan kerangka pemikiran atau konsep penelitian. Kerangka pikir ini membantu peneliti dalam merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian. Kerangka pikir juga mencakup bagaimana peneliti menghubungkan teori dengan fakta di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Berdasarkan rancangan, kerangka pikir penelitian ini berbentuk seperti berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian kualitatif dengan judul "Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir di Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung" didasarkan pada teori kesiapsiagaan menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006). Teori ini menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir melibatkan lima aspek yang saling terkait, yaitu pengetahuan terhadap risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana keadaan darurat, sistem peringatan bencana, dan kemampuan memobilisasi sumber daya.

Kesiapsiagaan masyarakat Desa Citeureup dalam menghadapi bencana banjir didasarkan pada lima aspek utama yang saling terkait. Pengetahuan terhadap risiko bencana menjadi fondasi utama, membentuk kesadaran dan sikap masyarakat untuk lebih waspada. Kebijakan dan panduan yang jelas dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kerangka acuan dalam langkah-langkah kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Rencana keadaan darurat yang disusun, mencakup prosedur evakuasi dan penyelamatan, harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial setempat. Sistem peringatan bencana yang efektif, seperti sirine atau pesan singkat, memberikan informasi cepat agar masyarakat dapat mengambil tindakan antisipatif. Terakhir, kemampuan memobilisasi sumber daya, termasuk logistik dan tenaga relawan, menjadi faktor penentu dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana.

Dengan mengintegrasikan kelima aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat Desa Citeureup dalam menghadapi bencana banjir. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam

tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat, kebijakan dan panduan, rencana sistem peringatan, dan mobilisasi sumber daya yang telah diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak banjir di masa depan.